

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia Periode 2017-2018)

Fita Nurjannah, Muhammad Asim Asy'ari*

Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

Email: asim.asyari@trunojoyo.ac.id*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine about presence or absence of the influence of Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Area Areas on the allocation of capital expenditure for Regency / City Governments throughout Indonesia for 2017-2018. The sample in this study is the Government of Regencies / Cities throughout Indonesia, amounting to 506 Regencies / Cities. This study uses secondary data, consist of APBD Realization Data for the 2017-2018 Fiscal Year and Area Data taken from the official website of the DJPK and the Ministry of Home Affairs. Analysis of the data used is multiple linear regression with hypothesis testing using t test, F test, and the coefficient of determination. The results showed that partially PAD, DBH, DAU, and Regional Area variables had a significant positive effect on capital expenditure. Simultaneously the PAD, DBH, DAU, and Regional Area variables have a significant positive effect on capital expenditure.

Keywords: *Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Area Size, and Capital Expenditures.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia Periode 2017- 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 506 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017-2018 dan data Luas Wilayah yang diambil dari website resmi DJPK dan Kemendagri. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, dan Belanja Modal.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Konsep dalam UU ini dapat memperjelas tujuan dari konsep otonomi daerah, yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan perekonomian maupun mensejahterakan masyarakatnya melalui belanja daerah, terutama untuk belanja modal yang berkenaan langsung terhadap peningkatan sarana dan prasarana publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh maupun menambah aset tetap dan aset yang lainnya yang manfaatnya lebih dari satu tahun periode akuntansi (Syukri dan Hinaya, 2019). Namun, pada kenyataannya persentase untuk belanja modal masih terbilang rendah dibandingkan dengan belanja yang lain. Belanja modal yang produktif sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menstimulasi perekonomian saat ini. Rendahnya realisasi belanja modal serta tekanan dari ketidakpastian global saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian (Indrawati, 2019).

Pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota perlu mengidentifikasi dan menentukan sumber pendapatan apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan, baik pendapatan dari pusat berupa dana perimbangan maupun dari pendapatan daerah sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang lainnya. Namun, diharapkan pemerintah daerah untuk tidak terlalu bergantung terhadap dana perimbangan, dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan daerahnya sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradita (2013), yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Yovita dan Dwi (2011). Namun, kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradita (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan positif terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan menurut Sholikhah dan Agus (2014), variabel DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal karena DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini dapat dijadikan sebagai dana untuk pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (UU No. 33 Tahun 2004). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholikhah dan Agus (2014), yang menunjukkan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian oleh Mundiroh (2019) yang menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal yang besar dibutuhkan oleh wilayah daerah yang cukup luas dalam pemenuhan sarana dan prasarana maupun pembangunan daerah lewat infrastrukturnya. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel luas wilayah sebagai indikator non keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) menunjukkan persamaan mengenai variabel luas wilayah, luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Karena adanya beberapa ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh PAD, DAU, DBH, serta Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal pada periode 2017-2018 dengan penggunaan populasi seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Penggunaan data periode dua tahun terakhir diharapkan mampu memberikan informasi yang sesuai terkait dengan alokasi belanja modal saat ini. Selain itu, penambahan variabel luas wilayah juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dana untuk setiap daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori ini dapat diasumsikan merupakan suatu hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, teori ini memfokuskan kepada kepentingan organisasi sebagai sasaran utama bukan tujuan individu masing-masing. Menurut teori ini manajemen dipandang dapat melakukan usaha yang terbaik untuk keberhasilan perusahaan, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan publik maupun stakeholder. Hubungan teori ini dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah sebagai suatu lembaga negara yang dipercaya sebagai pengambil keputusan sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang asli dan dihasilkan dari suatu daerah itu sendiri. Pendapatan ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai modal dasar dalam membiayai pembangunan maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir ketergantungan dana terhadap pemerintah pusat. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 6) disebutkan bahwa ada dua sumber pendapatan asli daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah (Yovita dan Dwi, 2011).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana ini biasa disebut dengan istilah (Block Grant) yaitu transfer dana yang dialokasikan demi tujuan membiayai pengeluaran maupun kebutuhan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Menurut Santosa dan Mohamad (2013), untuk pembagian persentase bergantung pada potensi fiskal setiap daerah.

Dana Bagi Hasil

Menurut UU No.33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini dapat dijadikan sebagai dana untuk pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Persentase tertentu yang

didasarkan atas daerah penghasil dijadikan pola bagi hasil dari penerimaan ini. DBH yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat terdiri dari dua jenis yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam).

Luas Wilayah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Luas Wilayah merupakan salah satu komponen yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana daerah. Pernyataan tersebut dimaksudkan jika semakin besar luas wilayah suatu daerah maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakannya. Jadi semakin luas suatu daerah maka semakin besar belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri (Junaedy, 2015).

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Yovita dan Dwi, (2011) belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

PAD merupakan sumber pendapatan lokal daerah yang juga dijadikan sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan daerah naik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga akan lebih tinggi serta tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula (Santosa Dan Mohamad, 2013).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya terutama meningkatkan pembangunan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. PAD harus digali sebesar-besarnya jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Hidayah dan Hari (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Menurut Sholikhah dan Agus (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam penentuan alokasi belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia.

Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, DBH merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya DBH yang diterima suatu daerah akan meningkatkan besaran APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH seperti DBH Pajak dan DBH SDA, mana yang berpotensi untuk ditingkatkan dan mempunyai pengaruh positif. Karena salah satu penerimaan berasal dari masyarakat berupa pajak, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan timbal balik yang sesuai.

Penelitian oleh Novianto dan Rafiudin (2015) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Heru (2016).

H2: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dimana semakin banyak DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Setiap dana transfer dalam bentuk DAU diterima pemerintah daerah ditujukan untuk belanja daerah termasuk belanja modal. Dengan dana tersebut pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang baik.

Namun, terkadang masih banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja cenderung optimis sedangkan rencana untuk pendapatan cenderung pesimis (Santosa dan Mohamad, 2013). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayah dan Hari (2014) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2013) menyatakan hasil yang sama. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal sangat dipengaruhi oleh sumber DAU ini.

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia.

Hubungan Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Namun, setiap daerah mempunyai wilayah dengan luas yang berbeda-beda, jika suatu daerah mempunyai luas wilayah yang besar otomatis anggaran yang akan dikeluarkan juga besar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bijak dan cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009), menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian dari Sholikhah dan Agus (2014) menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H4: Luas Wilayah berpengaruh pada alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri dari 508 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu tahun 2017-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2018 dilaporkan secara lengkap dan ketersediaan data terkait variabel independent yang akan diteliti. Sampel yang didapatkan dan memenuhi persyaratan sebanyak 506 kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD Pemerintah Kab/Kota se-Indonesia TA 2017-2018, yang terdiri dari data realisasi PAD, DAU, DBH, Alokasi Belanja Modal yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Luas Wilayah bersumber dari website resmi Kementerian Dalam Negeri.

Variabel Penelitian

Variabel Belanja Modal

Belanja modal sendiri merupakan suatu pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi (PP Nomor 71 Tahun 2010). Pengukuran variabel Belanja Modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan:

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004. Variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan:

DAU Kabupaten/kota = 90% x 25% x PDN (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot DAU

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DBH merupakan salah satu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat diukur dengan Perhitungan:

DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak

Variabel Luas Wilayah

Wilayah merupakan ruang yang terdiri dari kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (PP No. 28 Tahun 2008). Luas dari setiap daerah berbeda-beda, hal ini juga

berkaitan langsung dengan kebutuhan fasilitas publik dan infrastrukturnya. Oleh karena itu, luas wilayah suatu daerah juga menjadi salah satu indikator bagi pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal yang akan digunakan (Sholikhah dan Agus, 2014).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder dari website milik Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan).

Teknik Analisis Data

Metode atau teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui profil dari data penelitian yang meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai standar deviasi dan nilai variansi. Sedangkan, uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedestisitas.

Uji hipotesis menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R²). Nilai Uji Parsial hasilnya dapat dilihat dari tingkat signifikansinya jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan berpengaruh atau signifikan. Nilai Uji Simultan hasilnya dapat dilihat dari tingkat signifikannya jika lebih kecil dari 0,05 maka keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian rumus dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal; α = Konstanta; β = Koefisien Regresi (Slope); X₁ = Pendapatan Asli Daerah; X₂ = Dana Alokasi Umum; X₃ = Dana Bagi Hasil; X₄ = Luas Wilayah; e = Error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	1012	1266090	5161844571	235117420,83	443204496,878
DBH	1012	214866	2538147375	101168291,83	219988673,114
DAU	1012	141994115	2060202697	676274821,77	285925329,486
LW	1012	16,06	44071,00	3778,4047	5633,27625
BM	1012	45531533	2517891658	311218907,56	209768580,930
Valid N (listwise)	1012				

Sumber: Output SPSS

Keterangan: (dalam jutaan rupiah, kecuali Luas Wilayah dalam *km*²)

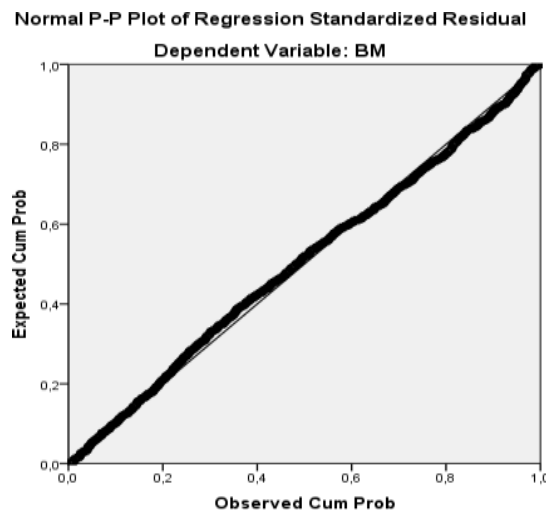
Dari tabel di atas dapat diketahui beberapa informasi bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 1012, rata-rata jumlah PAD (X₁) Pemerintah Kab/Kota se- Indonesia sebanyak Rp

235,1 Miliar. Jumlah PAD terendah sebesar Rp 1,2 Miliar yaitu Kabupaten Deiyai pada tahun 2018 dan PAD tertinggi sebesar Rp 5,1 Triliun yaitu Kabupaten Surabaya pada tahun 2017 dengan standar deviasi Rp 443,2 Miliar. Jumlah DBH (X2) Pemerintah Kab/Kota se-Indonesia sebanyak Rp 101,1 Miliar. Jumlah DBH terendah sebesar Rp 214,8 Juta yaitu Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 dan DBH tertinggi sebesar Rp 2,5 Triliun yaitu pada Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2018 dengan standar deviasi Rp 219,9 Miliar.

Jumlah DAU (X3) Pemerintah Kab/Kota se-Indonesia sebanyak Rp 676,2 Miliar. Jumlah DAU terendah sebesar Rp 141,9 Miliar yaitu pada Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2017 dan DAU tertinggi sebesar Rp 2 Triliun yaitu pada Kabupaten Bandung di tahun 2018 dengan standar deviasi Rp 285,9 Miliar. Rata-rata luas wilayah (X4) Kab/Kota di Indonesia adalah 3.778 km² dengan luas wilayah terkecil adalah 16 km² dan wilayah dengan luas terbesar adalah 44.071 km² dengan standar deviasi 5.633 km². Jumlah Belanja Modal (Y) Pemerintah Kab/Kota se-Indonesia sebanyak Rp 311,2 Miliar, dengan jumlah Belanja Modal terendah sebesar Rp 45,5 Miliar yaitu pada Kabupaten Biak Numfor di tahun 2017 dan Belanja Modal tertinggi sebesar Rp 2,5 Triliun yaitu Kabupaten Surabaya pada 2017 dengan standar deviasi Rp 209,7 Miliar.

Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik normal probability plot dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang bertujuan untuk menguji normalitas residual. Berikut ini hasil uji normalitas:



Gambar 1 Analisis Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 Uji Statistik Kolmogorov-Smimov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		1012
Normal Parameters	Mean	0E-7
	Std Deviation	,3323183
	Absolute Differences	,030
Most Extreme Differences	Positive	,025
	Negative	-,030
Kolmogorov-Smimov Z		,953
Asymp. Sig. (2-tailed)		,324

Test distribution is Normal

Sumber: Output SPSS

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya hubungan linier antara variabel bebas. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat diketahui jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Uji Multikolinieritas:

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,392	2,553
DBH	,703	1,422
DAU	,541	1,848
LW	,668	1,498

Sumber: Output SPSS

Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Berikut ini adalah hasil dari Uji Autokorelasi:

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,33298	1,348

Sumber: Output SPSS

Hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,348 dengan jumlah data analisis 1012. Jumlah variabel bebas 4 nilai $dl = 1.89284$ dan $du = 1.90430$ maka nilai DW 1,348 berada diantara -2 sampai +2 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atau pengamatan-pengamatan lain. Untuk melihat tingkat signifikansinya pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Rank Spearman's rho. Berikut ini adalah hasil dari Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman's rho:

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
PAD	,374	Bebas Heteroskedastisitas
DBH	,128	Bebas Heteroskedastisitas
DAU	,683	Bebas Heteroskedastisitas
LW	,533	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dari suatu penelitian. Metode ini digunakan dalam pengujian perihal untuk mengetahui seberapa pengaruh PAD, DAU, DBH dan Luas Wilayah terhadap belanja modal. Berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	t	Sig.
(Constant)	6,058	9,664	,000
PAD	,146	10,242	,000
DBH	,125	11,396	,000
DAU	,404	10,828	,000
LW	,035	4,113	,000

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari uji analisis regresi berganda, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,058 + 0,146 (X1) + 0,125 (X2) + 0,404 (X3) + 0,035 (X4) + e$$

Persamaan tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 6,058 menyatakan bahwa jika PAD, DBH, DAU, dan LW bernilai nol, maka nilai dari belanja modal sebesar 6,058.
2. PAD berpola positif dengan nilai koefisien sebesar 0,146 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
3. DBH berpola positif dengan nilai koefisien sebesar 0,125 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
4. DAU berpola positif dengan nilai koefisien sebesar 0,404 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
5. Luas Wilayah berpola positif dengan nilai koefisien sebesar 0,035 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengujian parsial (Uji t) merupakan salah satu uji hipotesis yang bertujuan untuk menguji tingkat pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial ini dapat dilihat dari tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 7 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Model	t	Sig
(Constant)	9,664	,000
PAD	10,242	,000
DBH	11,396	,000
DAU	10,828	,000
LW	4,113	,000

Sumber: Output SPSS

Dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil berupa tabel di atas yaitu:

1. PAD menunjukkan nilai dibawah $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $10,242 > t$ -tabel sebesar 1,962. Disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. DBH menunjukkan nilai dibawah $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $11,396 > t$ -tabel sebesar 1,962. Disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. DAU menunjukkan nilai dibawah $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $10,828 > t$ -tabel sebesar 1,962. Disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4. Luas Wilayah menunjukkan nilai dibawah $0,000 < 0,05$ dan nilai t- hitung $4,113 > t$ -tabel sebesar 1,962. Disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Model	Sum of Squares	f	Mean Square	F	Sig
Regression	138,573		34,643	312,4	,000 ^b
Residual	111,650	1007	,111	56	
Total	250,223	1011			

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 312,456 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansinya dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 312,456 > F-tabel sebesar 2,380. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Luas Wilayah (X4) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap belanja modal (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel dependen yang dilihat dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R-square) yang dihasilkan. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,744 ^a	,554	,552	,33298

Sumber: Output SPSS

Hal ini dapat diartikan bahwa variabel PAD, DBH, DAU, dan LW mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel belanja modal sebesar 55,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selain itu nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,744 yang berarti tingkat asosiasi variabel independen dengan variabel dependen adalah cukup kuat.

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat signifikansi variabel PAD terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah maka alokasi untuk belanja modal daerah tersebut juga meningkat. Kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya dilihat dari seberapa besar penerimaan yang diterima, terutama dari PAD.

Jika suatu daerah memiliki potensi PAD yang cukup besar, hal tersebut menjadi nilai positif baik dari segi tingkat kemandirian daerah maupun tingkat pemenuhan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Putu (2018) serta diperkuat oleh penelitian Sholikhah dan Agus (2014) yang memiliki pernyataan yang sama bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dilihat dari kacamata teori stewardship, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan timbal balik berupa pelayanan publik yang baik, karena masyarakat juga ikut berkontribusi atas peningkatan PAD.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DBH berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat signifikansi variabel DBH terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi DBH yang diterima oleh suatu daerah maka alokasi untuk belanja modal daerah tersebut juga semakin meningkat. Besaran DBH yang diterima oleh suatu daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam merencanakan pembiayaan daerah seperti pengalokasian belanja modal.

Prinsipnya adalah dari daerah untuk daerah, karena apa yang sudah dikelola dan diambil dari daerah akan dikembalikan kepada daerah dalam bentuk DBH. Sebagai salah satu penerimaan daerah, DBH dapat menjadi penerimaan daerah utama dalam menunjang alokasi belanja modal apabila porsi DBH yang diterima daerah cukup tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Lia (2016) serta diperkuat oleh penelitian Sholikhah dan Agus (2014) yang memiliki pernyataan yang sama bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Besarnya DBH yang diterima suatu daerah akan meningkatkan besaran APBD, dimana DBH merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi pemerintah daerah untuk memenuhi belanja daerah dan sebagai modal dasar untuk mendapatkan dana pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH seperti DBH Pajak dan DBH SDA, mana yang berpotensi untuk ditingkatkan dan mempunyai pengaruh positif.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DAU berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat signifikansi variabel DAU terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh suatu daerah maka alokasi untuk belanja modal daerah tersebut juga meningkat. Sama halnya dengan penerimaan daerah dari pusat yang lain, DAU juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap alokasi

belanja modal. Tujuan dari adanya DAU sendiri untuk pemerataan ekonomi antar daerah sebagai bentuk upaya terlaksananya desentralisasi.

Namun, pada faktanya kontribusi DAU terhadap alokasi belanja modal masih belum efektif sehingga pemerataan pembangunan dan fasilitas publik belum terlaksana dengan baik. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik meningkat, dan mengakibatkan kebergantungan daerah terhadap dana transfer pusat terutama DAU menjadi tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Putu (2018) serta diperkuat oleh penelitian Andriani dan Lia (2016) yang memiliki pernyataan yang sama bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Setiap dana transfer dalam bentuk DAU diterima pemerintah daerah ditujukan untuk belanja daerah termasuk belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus paham mengenai penggunaan dana tersebut sesuai prioritas dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat signifikansi variabel luas wilayah terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut mengartikan bahwa semakin luas suatu wilayah maka alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk belanja modal daerah tersebut juga besar. Jika suatu daerah memiliki wilayah yang luas ditambah dengan populasi penduduknya yang tinggi, dapat menjadikan luas wilayah sebagai salah satu faktor dalam penentuan besaran alokasi belanja modal. Hal ini tidak menjadi halangan untuk suatu daerah dalam memajukan daerah dan masyarakatnya, apabila pemerataan pembangunan dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan terhadap alokasi belanja modal harus dilakukan dengan sebaik mungkin, agar pemerataan pembangunan fasilitas publik dapat terealisasi dengan baik.

Realisasi tersebut juga harus selaras dengan peningkatan pelayanan publik untuk menunjang produktivitas masyarakat di setiap daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Agus (2014) serta diperkuat oleh penelitian Kusnandar dan Dodik (2009) yang memiliki pernyataan yang sama bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.

Pengaruh PAD, DBH, DAU dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa PAD, DBH, DAU dan Luas Wilayah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini didukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholikhah dan Agus (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DBH, DAU, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Untuk hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada uji statistik F (uji simultan) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah $0,000 < (\alpha = 0,05)$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Luas Wilayah (X4) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan

terhadap belanja modal (Y). Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah secara bersama-sama terhadap belanja modal adalah sebesar 55,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
4. Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbilang singkat yakni tahun 2017-2018 karena keterbatasan untuk data terbaru, sehingga penelitian ini dimungkinkan kurang menggeneralisasi.
2. Variabel yang digunakan oleh penulis masih terbatas, sehingga kurang mampu menggambarkan dari segi variabel yang lain.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode pengamatan lebih dari dua tahun, dengan data yang terbaru sehingga lebih mampu menggeneralisasi hasil penelitian yang dilakukan.
2. Variabel yang digunakan diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dalam penelitian selanjutnya, dengan menambah variabel independen yang lain baik ukuran maupun jenis penerimaan pemerintah daerah, dapat juga menggunakan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, dan jumlah pegawai.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan metode pengujian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Ni, Putu dan Lia, Yuliana. 2016. Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2013. Jurnal Ilmiah WIDYA. Vol.3 (3). ISSN: 2337-6686. ISSN-L: 2338-3321. Jakarta: STIS.

- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Biak Numfor Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. <http://biaknumforkab.bps.go.id> (Diakses Tanggal 14 April).
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deiyai Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018. <http://deiyaikab.bps.go.id> (Diakses Tanggal 14 April).
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha <http://kukarkab.bps.go.id> 2014-2018. (Diakses Tanggal 14 April).
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha <http://kukarkab.bps.go.id> 2013-2017. (Diakses Tanggal 14 April).
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018. <http://tebingtinggikota.bps.go.id> (Diakses Tanggal 14 April).
- Davis, dkk. 1997. Towards a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*. Vol.22 (1). Hal: 20-47.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. APBD, Realisasi APBD, dan Neraca. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> (Diakses Tanggal 21 Oktober).
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. Vol.16 (1). Hal: 49-66. The University of New South Wales.
- Halim, Abdul dan Syukriy, Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 (1). Yogyakarta: UGM.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah Dan “Fiscal Stress”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.16 (4). Yogyakarta: UGM.
- Hidayah, Nurul dan Hari, Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Vol.18 (1). Jakarta: UMB.
- Jaya, I, Putu dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.7 (1). ISSN: 2302- 8556. Bali: UNUD.
- Junaedy. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Papua: UNIYAP.
- Juniawan, Made dan Ni, Putu, Santi. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*. Vol.7 (3). ISSN: 2302- 8912. Bali: UNUD
- Kementerian Dalam Negeri. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan Seluruh Indonesia.

- https://www.kemendagri.go.id/media_filemanager/2013/05/28/b/u/buku_induk_kode_data_dan_wilayah_2013.pdf (Diakses Tanggal 21 Oktober).
- Kusnandar dan Dodik, Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal dan Prosiding SNA*. Vol 15. Jakarta: UI.
- Mulyani, Sri. 2019. Keterlambatan Realisasi Belanja Modal. <https://bisnis.tempo.co/read/1252219/sri-mulyani-sebut-kementerian-lambat-realisasikan-belanja-modal> (Diakses Tanggal 25 Januari).
- Mundiroh, Siti. 2019. Pengaruh Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. Vol 2 (1). Tangerang: UNPAM.
- Naap, Herry. 2019. Serapan Anggaran Belanja Daerah Biak Numfor. <http://papua.antaranews.com/amp/berita/508332/serapan-anggaran-belanja-daerah-biak-numfor-baru-32-persen> (Diakses Tanggal 23 April).
- Naser, Dadang. 2018. Perubahan Raperda Perubahan Anggaran 2018. <http://www.bandungkab.go.id/tags/perubahan-raperda-perubahan-anggaran-2018> (Diakses Tanggal 20 April).
- Novianto, Riko dan Rafiudin, Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. Vol.4 (1). ISSN: 2302-7169.
- Oktora, Fahri dan Winston, Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*. Vol.2 (1). Tolitoli: STIEMUJAHIDIN.
- PP No. 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP No. 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Pradita, Rizanda. 2013. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. Vol.1 (2). Surabaya: UNESA.
- Putra, Putu dan I, Gusti, Ketut. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.11 (3). ISSN: 2302- 8556. Bali: UNUD.
- Safarina, Hamida. 2019. Dana Perimbangan Masih Sokong 73%. <https://news.ddtc.co.id/dana-perimbangan-masih-sokong-73-pendapatan-kabupaten-ini-17154> (Diakses Tanggal 18 April).
- Santosa, Agus dan Mohamad, Ainur. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (Studi

- Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol.20 (2). ISSN: 1412-3126. Semarang: STIKUBANK.
- Sarjono, Haryadi dan Winda, Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholikhah, Imroatus dan Agus, Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. Vol.3 (4). ISSN: 2252-6765. Semarang: UNNES.
- Sukarmi, Ni, Wayan dan Iga, Nyoman. 2016. Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E- Jurnal Akuntansi*. Vol.5 (3). ISSN: 2337-3067. Bali: UNUD.
- Sumartono, Yusron. 2018. PAD Surabaya Ditargetkan Rp 4,712 Triliun. https://surabaya.go.id/id/berita/4584_7/2018-pad-surabaya-ditargetkan (Diakses Tanggal 18 April).
- Susanti, Susi dan Heru, Pahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kab/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vo.1 (1). Aceh: UNSYIAH.
- Syukri, Muhammad dan Hinaya. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal of Economic Management and Accounting*. Vol.2 (2). p-ISSN: 2615- 1871. e-ISSN: 2615-5850. Palopo: UNANDA.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Uyanto, Stanislaus. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyuni dan Priyo, Hari. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kotribusi Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah. *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya*. Salatiga: UKSW.
- Wardhana, dkk. 2018. *Transfer Pemerintah Pusat dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat*. Sukabumi: Budhi Mulia.
- Yovita, Farah dan Dwi, Cahyo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.